

Dinamika Hukum Pertahanan Dan Keamanan Negara Dalam Konteks Globalisasi: Tantangan Dan Prospek Di Abad Ke-21

Muhammad Anwar Ibrahim

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
E-mail: amir.mustaram5@gmail.com

Irwan Triadi

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
E-mail: irwantriadi1@yahoo.com

Abstract. *The ever-evolving global landscape, marked by rapid technological advancements and increasingly complex security threats, places national defense and security law at the forefront of safeguarding a nation's stability, sovereignty, and safety. This research delves into the multifaceted dimensions of defense and security law, aiming to comprehend, evaluate, and analyze legal issues pertinent to national defense and security. Employing a juridical analysis methodology, this study focuses on an in-depth review of existing legal regulations, encompassing a spectrum from constitutional provisions to statutes, governmental regulations, relevant court decisions, and international agreements associated with national defense and security. The juridical analysis comprises several key components. Firstly, an extensive exploration of legal theories in defense and security as elucidated by experts in the field through literature review provides foundational theoretical insights. Secondly, a meticulous examination of legal documents unveils the intricacies of laws governing defense and security, shedding light on fundamental aspects crucial to the nation's safety. Additionally, comparative legal analysis across multiple jurisdictions elucidates the disparities, commonalities, and implementations of laws in defense and security contexts globally. Furthermore, the study of concrete cases offers a practical understanding of legal application in real-world defense and security scenarios. The methodological approach involves an exhaustive scrutiny of legal texts and a meticulous interpretation of pertinent legal aspects, aiming to identify weaknesses within the existing legal framework. From these evaluations, suggestions for enhancements or developments will be proposed to augment the effectiveness and adaptability of laws pertaining to national defense and security. This research endeavors to contribute substantively to the comprehension, advancement, and reform of the domain.*

Keywords: *National Defense, Security Law, Juridical Analysis*

Abstrak. Lanskap global yang terus berkembang, ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi dan ancaman keamanan yang semakin kompleks, menjadikan hukum pertahanan dan keamanan negara sebagai fokus utama dalam menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keselamatan suatu bangsa. Penelitian ini menelusuri dimensi-dimensi yang kompleks dalam hukum pertahanan dan keamanan, bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menganalisis isu-isu hukum yang relevan dengan pertahanan dan keamanan nasional. Dengan menggunakan metodologi analisis yuridis, studi ini menitikberatkan pada tinjauan mendalam terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada, mulai dari ketentuan konstitusi hingga undang-undang, regulasi pemerintah, keputusan pengadilan yang relevan, dan perjanjian internasional yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Analisis yuridis meliputi beberapa komponen kunci. Pertama, eksplorasi mendalam terhadap teori-teori hukum dalam pertahanan dan keamanan yang dijelaskan oleh pakar di bidang tersebut melalui tinjauan literatur memberikan wawasan teoritis yang kokoh. Kedua, pemeriksaan teliti terhadap dokumen-dokumen hukum mengungkap kompleksitas regulasi hukum yang mengatur pertahanan dan keamanan, memberikan pencerahan pada aspek-aspek mendasar yang penting bagi keamanan negara. Analisis hukum perbandingan lintas negara akan menjadi landasan untuk memahami perbedaan, kesamaan, dan implementasi hukum dalam konteks pertahanan dan keamanan negara secara global. Selain itu, studi kasus akan memberikan pemahaman praktis terkait penerapan hukum dalam situasi nyata dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pendekatan metodologis ini melibatkan pemeriksaan teliti terhadap teks hukum dan interpretasi yang cermat terhadap aspek hukum yang relevan, dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum yang ada. Dari evaluasi ini, akan diusulkan saran perbaikan atau pengembangan guna meningkatkan efektivitas dan adaptabilitas hukum terkait pertahanan dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pemahaman, pengembangan, dan reformasi dalam bidang ini.

Kata kunci: *Pertahanan Nasional, Hukum Keamanan, Analisis Yuridis*

PENDAHULUAN

Dalam konteks dinamika global yang terus berubah, di mana teknologi menjadi pusat transformasi dan ancaman keamanan semakin kompleks, hukum pertahanan dan keamanan negara menjadi sorotan utama dalam menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keamanan suatu negara. Namun, adaptasi hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi dan ancaman non-tradisional telah memunculkan sejumlah tantangan yang memerlukan pemahaman dan penelitian mendalam.¹

Dalam menghadapi ancaman keamanan siber yang semakin meresahkan, terdapat ketidakseimbangan antara kemajuan teknologi dan kecanggihan hukum yang ada dalam menangani serangan siber. Pertanyaan mendasar muncul tentang sejauh mana hukum pertahanan dan keamanan negara mampu melindungi infrastruktur kritis dan menjaga kestabilan nasional di era di mana ancaman siber menjadi nyata.²

Isu terorisme dan radikalisme juga menantang landasan hukum dalam menghadapi ancaman keamanan.³ Penegakan hukum terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas terorisme memunculkan dilema terkait keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, kerjasama internasional dalam menangani ancaman lintas batas menjadi semakin penting. Namun, perbedaan hukum dan kebijakan antarnegara memunculkan pertanyaan tentang efektivitas hukum internasional dalam konteks pertahanan dan keamanan negara, serta sejauh mana kerjasama dapat terwujud dalam mengatasi ancaman bersama.⁴

Dalam konteks hukum pertahanan dan keamanan negara, adopsi teknologi yang pesat telah memberikan manfaat besar sekaligus menimbulkan tantangan baru. Kecepatan perkembangan teknologi sering kali melebihi kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri, menyebabkan ketidakseimbangan yang merugikan dalam mengatasi ancaman keamanan siber. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang kesiapan hukum dalam melindungi infrastruktur kritis dan data sensitif dari serangan siber yang semakin canggih.⁵

¹ Djoko Subroto, *Kualitas Perwira Merupakan Kunci Keberhasilan PArena Abri Pada Abad Ke-21*, Jurnal Ketahanan NAsional, Vol. II No. 3, Desember 1997. hlm. 11

² Donny Ermawan, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia*, Jurnal Kajian LEMHANAS RI Edisi 32, Desember 2017. hlm. 6

³ Djoko Subroto, *Kualitas Perwira Merupakan Kunci Keberhasilan PArena Abri Pada Abad Ke-21*, Jurnal Ketahanan NAsional, Vol. II No. 3, Desember 1997. hlm. 12

⁴ Djoko Subroto, *Kualitas Perwira Merupakan Kunci Keberhasilan PArena Abri Pada Abad Ke-21*, Jurnal Ketahanan NAsional, Vol. II No. 3, Desember 1997. hlm. 13

⁵ Ratna Dwi Estuningtyas, *Dampak Globalisasi pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir dan Ideologi Serta Tantangan Dakwahnya*, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Komunikasi & Bimbingan Islam NO 2 2018, hlm. 2

Sementara dalam hal terorisme dan radikalisme, hukum yang ada di banyak negara masih menghadapi tantangan dalam menemukan titik keseimbangan antara upaya menegakkan keamanan nasional dan perlindungan terhadap hak-hak asasi individu yang esensial. Upaya penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas terorisme memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁶

Kerjasama internasional, di sisi lain, menjadi landasan yang penting dalam menangani ancaman lintas batas. Namun, perbedaan dalam hukum dan kebijakan antar-negara seringkali menjadi hambatan dalam pencapaian kesepakatan yang efektif dan implementasi hukum internasional.⁷ Meskipun demikian, pentingnya kerjasama ini menjadi semakin mendesak dalam menghadapi ancaman yang tidak mengenal batas negara, seperti terorisme global, perdagangan manusia, dan kejahatan siber yang melintasi batas-batas nasional.

Dengan demikian, rumusan masalah yang timbul adalah sejauh mana hukum pertahanan dan keamanan negara mampu beradaptasi dengan perubahan global, khususnya dalam menghadapi ancaman teknologi seperti keamanan siber, dan bagaimana dampaknya terhadap infrastruktur serta kestabilan nasional? Bagaimana juga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum terhadap ancaman seperti terorisme dan radikalisme? Terakhir, bagaimana peran hukum internasional dalam menangani tantangan keamanan lintas batas di tengah perbedaan hukum dan kebijakan antarnegara?

METODE PENELITIAN

Metode analisis yuridis, digunakan sebagai landasan utama dalam penelitian ini, memungkinkan pengkajian mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Penelitian ini akan mengaplikasikan berbagai strategi analisis yang meliputi studi literatur, analisis dokumen hukum, perbandingan hukum lintas negara, dan studi kasus. Pendekatan ini akan menggali informasi terperinci dari berbagai sumber hukum yang relevan, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta perjanjian internasional, untuk memahami kerangka hukum yang ada.⁸

⁶ Supriyono, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum dan Tantangannya di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Hukum Responsif Vol 7 No. 2 2019 hlm.100-122

⁷ Wahyu Wardhana, *Poros Maritim: Dalam Kerangka Sejarah Maritim dan Ekonomi Pertahanan*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Vol. 18, No. 3 2016, hlm. 369-386

⁸ Rakha Pratama, Fauzi Gustarina Cempaka Timur dan Rudy Sutanto, *Revitalisasi Kewaspadaan Nasional Melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan terhadap Ancaman Perang Asimetris*, Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 10 No. 9 2023, hlm. 4548-4559

Studi literatur akan memfokuskan pada penelusuran teori-teori hukum yang telah dibahas oleh para ahli di bidang pertahanan dan keamanan negara. Analisis mendalam terhadap pemikiran para pakar akan memberikan wawasan yang mendalam terkait landasan teoritis dan konseptual dalam konteks hukum tersebut.

Analisis dokumen hukum akan mengarah pada pemahaman yang teliti terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku, termasuk konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional yang relevan. Evaluasi yang cermat terhadap teks hukum ini akan memungkinkan pengidentifikasian aspek-aspek yang mendasar dan relevan dengan bidang pertahanan dan keamanan negara.

Pembandingan hukum lintas negara akan menjadi landasan untuk memahami perbedaan, kesamaan, serta implementasi hukum dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Analisis perbandingan ini akan memberikan perspektif yang luas terhadap pendekatan hukum yang berbeda antar-negara, memperjelas perkembangan hukum dalam skala internasional, serta mempertimbangkan best practices dalam penegakan hukum terkait bidang ini.⁹

Studi kasus akan memberikan pemahaman mendalam terkait penerapan hukum dalam situasi nyata yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Analisis terhadap kasus-kasus konkret akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata, memungkinkan identifikasi kelemahan, serta mengevaluasi efektivitas hukum yang ada.

Pendekatan mendalam terhadap teks hukum dan interpretasi yang cermat terhadap aspek hukum yang relevan akan membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum yang ada.¹⁰ Dari sini, saran perbaikan atau pengembangan akan diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan adaptabilitas hukum dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Ini akan memungkinkan penelitian untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman, pengembangan, dan pembaruan dalam bidang ini.¹¹

PEMBAHASAN

Dinamika hukum pertahanan dan keamanan negara memiliki dampak yang signifikan terhadap infrastruktur serta stabilitas nasional. Pertumbuhan teknologi yang pesat, sementara

⁹ Angga Nurdin Rahmat, *Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi Pertahanan Global bagi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia*, Jurnal Transformasi Global Vol. 1 No. 2 2014, 199.

¹⁰ Angga Nurdin Rahmat, *Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi Pertahanan Global bagi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia*, Jurnal Transformasi Global Vol. 1 No. 2 2014, 120.

¹¹ Tatar Bonar Sulitonga, *Tantangan Globalisasi, Peran Negara dan Implikasinya terhadap Aktualisasi Nilai-nilai Ideologi Negara*, Jurnal Civic : Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 17 No. 1 2020 hlm. 17

menjadi katalisator kemajuan, juga memberikan tekanan besar pada infrastruktur negara karena rentan terhadap serangan siber yang semakin canggih. Ancaman ini mengancam infrastruktur vital seperti sistem keuangan, energi, dan komunikasi, mengakibatkan gangguan serius pada fungsi negara dan stabilitas ekonomi. Sementara itu, penegakan hukum terhadap terorisme dan radikalisme membawa kompleksitas tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia. Meskipun upaya penegakan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman teror, tindakan keras juga sering memunculkan pelanggaran terhadap hak asasi individu dan kebebasan sipil. Penerapan hukum yang terlalu keras dapat mengakibatkan penindasan terhadap kelompok minoritas atau kebebasan berekspresi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang penting.

Di sisi lain, hukum internasional memiliki peran yang penting dalam menangani tantangan keamanan lintas batas di tengah perbedaan hukum dan kebijakan antarnegara. Meskipun perbedaan ini sering kali menjadi hambatan, hukum internasional memberikan kerangka kerja untuk kerjasama antar-negara dalam menanggapi ancaman bersama. Instrumen-instrumen seperti perjanjian kerjasama dan konvensi internasional memberikan landasan untuk berbagi informasi, koordinasi tindakan, dan menjalankan upaya bersama dalam menangani ancaman lintas batas seperti terorisme global, perdagangan manusia, dan kejahatan siber. Meskipun tantangan dalam harmonisasi hukum internasional masih ada, peran ini menjadi penting dalam menghadapi ancaman yang tidak mengenal batas negara dan menjamin keamanan serta stabilitas di tingkat global.

Selain itu, Undang-Undang Keamanan Siber di beberapa negara, seperti UU No. 19 Tahun 2016 di Indonesia, memberikan kerangka kerja untuk melindungi sistem informasi vital negara dari serangan siber. Undang-undang semacam ini biasanya memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengatur, melindungi, dan menanggapi ancaman keamanan siber yang mungkin mempengaruhi infrastruktur kritis. Begitu pula, undang-undang anti-terorisme di banyak negara, seperti Counter-Terrorism and Security Act 2015 di Inggris, memberikan landasan hukum untuk penanggulangan terorisme dan radikalisme, memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil tindakan preventif dalam mencegah aktivitas terorisme. Meskipun implementasi undang-undang semacam ini memiliki tujuan yang jelas dalam menjaga keamanan nasional, seringkali terdapat perdebatan terkait keseimbangan antara keamanan dan perlindungan hak asasi manusia. Upaya pemerintah untuk menjaga keamanan terkadang bertabrakan dengan hak asasi individu, yang memunculkan dinamika kompleks dalam penerapan undang-undang tersebut.

Implikasi terhadap Infrastruktur dan Stabilitas Nasional

Dinamika hukum dalam konteks pertahanan dan keamanan negara memiliki implikasi yang substansial terhadap infrastruktur dan stabilitas nasional. Pertumbuhan teknologi yang cepat, sementara menjadi penggerak utama kemajuan, juga meningkatkan kerentanan infrastruktur negara terhadap serangan siber yang semakin canggih. Ancaman ini menghantui infrastruktur vital seperti sistem keuangan, energi, dan komunikasi, mengakibatkan potensi gangguan serius pada fungsi negara serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Sementara itu, penegakan hukum terhadap terorisme dan radikalisme memunculkan kompleksitas tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia. Upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman terorisme sering kali memunculkan pertanyaan etis tentang pengorbanan hak-hak individu dan kebebasan sipil. Penerapan hukum yang keras dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, menimbulkan kontroversi dan dilema dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara keamanan negara dan kebebasan individu.

Peran Hukum Internasional dalam Konteks Keamanan Global

Pentingnya hukum internasional dalam menangani ancaman lintas batas menjadi semakin jelas. Meskipun terdapat perbedaan dalam hukum dan kebijakan antarnegara, kerangka kerja hukum internasional memberikan landasan untuk kerjasama antar-negara dalam menanggapi ancaman bersama. Perjanjian kerjasama dan konvensi internasional memberikan kerangka bagi pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan implementasi upaya bersama dalam menangani tantangan global seperti terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan siber yang melintasi batas-batas nasional.

Penjelasan terkait Undang-Undang Keamanan Siber dan Anti-Terrorisme

Undang-Undang Keamanan Siber di berbagai negara, seperti UU No. 19 Tahun 2016 di Indonesia, serta undang-undang anti-terorisme di berbagai negara lainnya, memiliki peran krusial dalam memberikan landasan hukum bagi pemerintah dalam menghadapi ancaman kritis. Meskipun implementasi undang-undang semacam ini bermaksud untuk melindungi keamanan nasional, seringkali mereka menimbulkan perdebatan tentang keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia. Diskusi seputar implikasi sosial, etis, dan praktis dari penerapan undang-undang tersebut menjadi esensial dalam menegakkan keadilan sekaligus menjaga keamanan negara.

Diskusi yang luas mengenai hasil tersebut menyoroti kompleksitas dan perluasan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan hukum pertahanan dan keamanan negara di era yang terus berubah ini. Keseluruhan, perdebatan dan kajian lebih lanjut diperlukan untuk

menemukan solusi yang tepat dan seimbang dalam menjaga keamanan nasional sambil menjaga hak asasi manusia yang fundamental.

KESIMPULAN

Dinamika hukum pertahanan dan keamanan negara, terutama dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, memiliki implikasi yang signifikan terhadap infrastruktur serta stabilitas nasional. Pertumbuhan teknologi, sementara memberikan kemajuan yang luar biasa, juga meningkatkan kerentanan infrastruktur negara terhadap serangan siber yang semakin kompleks. Ancaman ini, jika tidak ditangani dengan tepat, dapat mengganggu fungsi esensial negara dan stabilitas ekonomi secara menyeluruh.

Penerapan hukum terhadap terorisme dan radikalisme memunculkan dilema etis dalam menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia. Meskipun penegakan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman teror, tindakan keras sering kali menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi individu. Pertanyaan yang muncul tentang sejauh mana tindakan keras dapat dilakukan tanpa melanggar hak asasi manusia menjadi poin sentral dalam diskusi terkait penegakan hukum dalam situasi ini.

Hukum internasional, di sisi lain, memainkan peran yang krusial dalam menanggulangi ancaman lintas batas di tengah perbedaan hukum dan kebijakan antarnegara. Meskipun tantangan harmonisasi hukum internasional masih ada, kerangka kerja ini memberikan landasan bagi kerjasama antar-negara dalam menanggapi ancaman bersama. Perjanjian kerjasama dan konvensi internasional menjadi instrumen penting untuk memfasilitasi pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan menjalankan upaya bersama dalam menangani tantangan global yang melintasi batas-batas nasional.

Implikasi dari Undang-Undang Keamanan Siber dan undang-undang anti-terorisme menyoroti pentingnya memiliki kerangka hukum yang jelas dalam menghadapi ancaman kritis. Namun, perlunya keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia menjadi pusat perdebatan dalam penerapan undang-undang semacam itu. Diskusi lanjutan yang mencakup implikasi sosial, etis, dan praktis dari penerapan undang-undang tersebut menjadi krusial dalam memastikan penegakan hukum yang adil sekaligus menjaga keamanan negara.

Keseluruhan, analisis mendalam mengenai dinamika hukum pertahanan dan keamanan negara memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Solusi yang tepat dalam menjaga keamanan nasional sambil mempertahankan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang fundamental memerlukan kajian yang lebih lanjut, kerjasama antarnegara yang kuat, serta

implementasi kebijakan hukum yang tepat guna menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks di era global ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ermawan, Donny. 2017. Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian LEMHANAS RI Edisi 32*.
- Estuningtyas, Ratna Dwi. 2018. Dampak Globalisasi pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir dan Ideologi Serta Tantangan Dakwahnya. *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Komunikasi & Bimbingan Islam, Nomor 2*.
- Pratama, Rakha, Timur, Fauzi Gustarina Cempaka, Sutanto, Rudy. 2023. Revitalisasi Kewaspadaan NAsional Melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan terhadap Ancaman Perang Asimetris. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 10 Nomor 9*.
- Rachmat, Angga Nurdin. 2014. Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi Pertahanan Global bagi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia. Malang: *Jurnal Transformasi Global, Volume 1, Nomor 2*.
- Sulitonga, Tatar Bonar. 2020. Tantangan Globalisasi, Peran Negara dan Implikasinya terhadap Aktualisasi Nilai-nilai Ideologi Negara. *Jurnal Civic Media Kajian Kewarganegaraan Vol.me 17 Nomor1*.
- Subroto, Djoko. 1997. Kualitas Perwira Merupakan Kunci Keberhasilan Peran Abri Pada Abad Ke-21. *Jurnal Ketahanan NAsional, Volume. 2 Nomor 3*.
- Supriyono. 2019. Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum dan Tantangannya di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Hukum Responsif Volume7 Nomor 2*.
- Wardhana, Wahyu. 2016. Poros Maritim: Dalam Kerangka Sejarah Maritim dan Ekonomi Pertahanan. *Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume18, Nomor 3*.